

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini tidak hanya dijalankan pada sektor bisnis saja, namun salah satunya juga pada sektor pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat (Simarmata dkk., 2020). Salah satu konsep pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pada bidang pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan publik tersebut dikenal dengan istilah *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Sudarsono & Lestari, 2018). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya (Perpres No.95 Tahun 2018, 2018). Tujuan dari pengembangan tersebut diarahkan untuk dapat membuat jaringan informasi terhadap pelayanan publik, membentuk hubungan yang interaktif untuk meningkatkan perekonomian nasional, membangun relasi dan komunikasi dengan beberapa lembaga negara, serta membentuk sistem manajemen yang bersifat efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Supriyanto dkk., 2021).

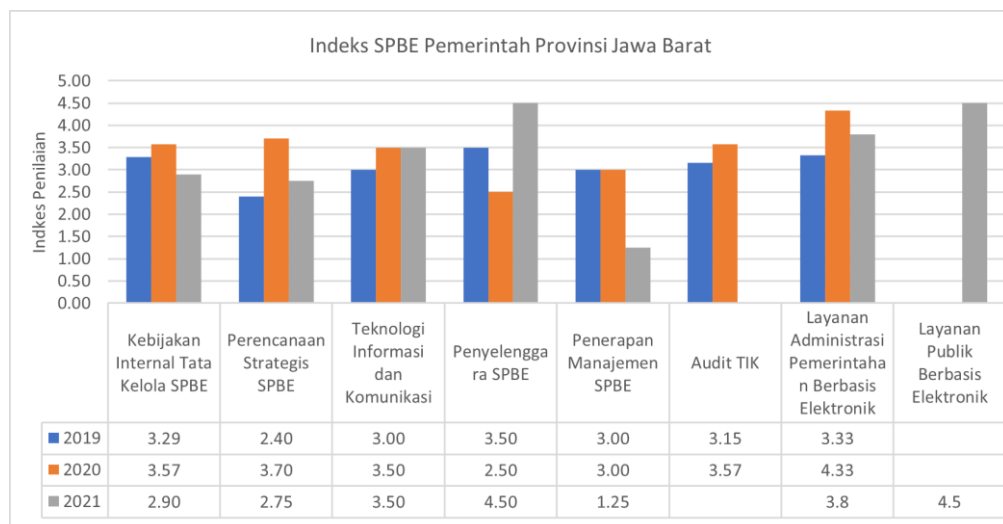
Dalam Perpres Tahun 2018, pemerintah memasukkan SPBE menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Sehingga dalam penyelenggaraannya, tidak terlepas dari pemantauan dan evaluasi untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Adapun pemantauan dan evaluasi SPBE tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE dan mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE (Nabilah, 2021).

Indeks penilaian yang digunakan dalam mengukur kematangan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah daerah yang dikelompokkan berdasarkan predikat adalah tertera pada Tabel I-1 sebagai berikut.

Tabel I-1 Predikat Penilaian SPBE

| No | Nilai Indeks | Predikat    |
|----|--------------|-------------|
| 1  | 4,2 – 5,0    | Memuaskan   |
| 2  | 3,5 – < 4,2  | Sangat Baik |
| 3  | 2,6 – < 3,5  | Baik        |
| 4  | 1,8 – < 2,6  | Cukup       |
| 5  | < 1,8        | Kurang      |

Berdasarkan informasi dari dokumen *Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* tahun 2021, melalui evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan evaluator eksternal kementerian PAN dan RB, menghasilkan bahwasanya indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan yaitu sebesar 3,28 dengan predikat baik. Namun, nilai indeks SPBE dan predikat yang diperoleh tersebut belum memenuhi target indeks SPBE yang diinginkan yaitu pada predikat sangat baik. Data yang diperoleh dalam laman web [opendata.jabarprov.go.id](http://opendata.jabarprov.go.id) tahun 2021 juga memaparkan bahwa indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut pada beberapa kategori SPBE mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebagaimana pada gambar grafik berikut.



Gambar I.1 Indeks SPBE berdasarkan kategori di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data penilaian SPBE pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 tersebut, dapat diketahui bahwasanya penilaian SPBE pada kategori Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Penerapan

Manajemen SPBE, dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, sehingga indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan belum dapat mencapai predikat sangat baik. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum berhasil mencapai bobot maksimal terhadap 47 indikator penilaian evaluasi SPBE (Peraturan Menteri PAN dan RB No. 59 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, 2020). Selain itu, hal yang mendasari permasalahan tersebut diantaranya juga disebabkan oleh penyusunan peta proses bisnis yang masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam mendukung keseluruhan layanan SPBE, pembangunan sistem informasi pada masing-masing instansi pemerintahan yang belum sepenuhnya memiliki strategi integrasi, serta sistem informasi yang belum terhubung antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga menyebabkan tumpang tindih data dan kurangnya tingkat validitas data pada lingkungan pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum meratanya pelaksanaan dan pengembangan SPBE baik antar Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota dalam menunjang keseluruhan domain SPBE pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Merujuk berdasarkan fakta tersebut, maka perlu dilakukannya peningkatan terhadap pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat mencapai target yang diinginkan dengan predikat sangat baik. Dalam membantu meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, diperlukannya sinergi yang baik dari setiap instansi Pemerintah Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan penyelenggaraan SPBE, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah.

Jika ditelaah berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah dalam mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel, terutama pada bidang kepegawaian. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Indikator kinerja kunci tingkat hasil (*Outcome*) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berdasarkan bidang kepegawaian serta Pendidikan dan

pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menunjukkan bahwa, Nilai kriteria pengadaan pegawai sebesar 36 poin, dinilai belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 40 poin.

2. Persentase tingkat kesejahteraan pegawai pada aspek Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah) hanya mencapai 80 persen, dan dinilai masih belum mencapai target Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu 100 persen.
3. Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan. Pengangguran mengalami kenaikan sebesar  $\pm 660.000$  orang sebanding dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,77 persen poin.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian meliputi pengadaan dan mutasi, pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu bidang yang berperan penting untuk dapat meningkatkan indeks arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama pada kategori Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bidang kepegawaian daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan analisis terhadap penyelenggaraan *e-government* atau SPBE pada Pemerintah Daerah khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat guna mencapai visi, misi, dan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait dengan implementasi SPBE yang dipaparkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan penerapan SPBE tersebut, yaitu berupa suatu perancangan Arsitektur *Enterprise* yang dapat mendefinisikan arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur layanan yang dapat menghasilkan pemetaan peta proses bisnis, keterikatan layanan pemerintah provinsi, dan integrasi antar aplikasi yang digunakan sebagai

acuan pengembangan dan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada perancangan *Arsitektur Enterprise* (*domain* Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan) menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2 pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pada sasaran Pemprov Jabar ‘Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel’.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahan kajian pada penelitian ini adalah “Bagaimana analisis dan perancangan *Arsitektur Enterprise* untuk domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu untuk menghasilkan rancangan *Arsitektur Enterprise* untuk domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## **I.4 Batasan Penelitian**

Batasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap perancangan *Enterprise Architecture* menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2 dengan penyesuaian terhadap PermenPAN RB. No.19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, terutama penyesuaian terhadap *output* yang dihasilkan pada *Arsitektur Proses Bisnis*.
2. Perancangan *arsitektur* berfokus pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan (menyesuaikan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023).

3. Penelitian difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada pada bidang kepegawaian, yang membawahi sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat ‘Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel’, yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.
4. Perancangan dilakukan pada proses inti BKD Provinsi Jawa Barat yaitu pada Program Kepegawaian Daerah.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan teori yang telah dipelajari dan fakta yang terjadi di lapangan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Dapat memberikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan analisis dan perancangan Arsitektur Pemerintah Berbasis Elektronik pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan dalam rangka meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No.59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi SPBE.
2. Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan analisis dan perancangan Arsitektur Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Dapat bermanfaat bagi penulis terkait penerapan Teknologi Informasi serta sebagai penambahan ilmu mengenai perancangan Arsitektur *Enterprise* pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.